

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kajian pariwisata orang yang melakukan perjalanan wisata disebut dengan nama wisatawan. Wisatawan terdiri dari berbagai variasi kelompok, salah satunya adalah kelompok berkebutuhan khusus. Kelompok wisatawan ini membutuhkan sarana, prasarana, dan fasilitas yang holistik agar dapat mengakomodasi kebutuhannya (Darcy, Mckercher, & Schweinsberg, 2020).

Penyandang disabilitas merupakan salah satu dari wisatawan berkebutuhan khusus, bersamaan dengan anak-anak, wanita hamil dan orang lanjut usia. Tidak berbeda dengan wisatawan pada umumnya, mereka juga mempunyai motivasi untuk pergi berwisata dan mempunyai status dan hak yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang pariwisata (Sarmah, Kamboj, & Chatterjee, 2022).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO,2020), pariwisata dapat berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan dengan mempromosikan aktivitas fisik, mengurangi stres, dan memberikan kesempatan untuk interaksi sosial. Selain itu, pariwisata dapat meningkatkan pengembangan pribadi dan kualitas hidup dengan memberikan kesempatan kepada individu untuk belajar pengetahuan baru, meningkatkan komunikasi antar-budaya, memperluas wawasan, meningkatkan kapasitas pemahaman terhadap dunia lain, dan untuk memperoleh atau mempertahankan keterampilan hubungan sosial.

Dari perspektif masyarakat, pariwisata juga dapat memberikan banyak manfaat termasuk pengurangan biaya adaptasi sosial, integrasi sosial, dan terwujudnya kesetaraan sosial. Karena manfaat-manfaat tersebut, UNESCAP dan

PBB telah memperjuangkan hak untuk pariwisata bersama dengan hak asasi manusia dasar lainnya (Marmion & Hindley, 2020).

Selama 30 tahun terakhir, penelitian tentang disabilitas dan pariwisata telah berkembang pesat. Sejak upaya pertama untuk mengevaluasi partisipasi orang dengan disabilitas dalam rekreasi dan pariwisata (Tomej & Duedahl, 2023). Dalam praktik pariwisata, kemajuan dalam mengoperasikan aksesibilitas tetap sangat lambat, termasuk di negara-negara berkategori maju. Terdapat lebih dari satu miliar penduduk bumi yang hidup dengan disabilitas permanen atau sementara terus menghadapi eksklusi dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

Menurut WHO 2021, diperkirakan terdapat sekitar 1,3 miliar orang penyandang disabilitas di dunia yang setara dengan sekitar 16% dari populasi dunia. Sementara di Indonesia, Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, menyebutkan bahwa total penyandang disabilitas di seluruh Indonesia berkisar 22,5 juta orang (Kemensos RI, 2023). UU No. 4 Tahun 1997 merupakan undang-undang pertama mengenai penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-undang tersebut menggunakan sudut pandang kesehatan, sehingga menggunakan kata penyandang cacat untuk menyebutkan penyandang disabilitas. Penyandang cacat dilihat sebagai individu yang sakit dan patut dikasihani. Tahun 2016, terbit undang-undang baru yang menggunakan pendekatan sosial dan HAM. Dimana dalam undang-undang tersebut dipergunakan kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memiliki 18 ketentuan. Terdiri dari 15 ketentuan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pelaksanaan, dua ketentuan yang

memerintahkan pembentukan Peraturan Presiden, dan satu ketentuan yang memerintahkan pembentukan Permensos. Dalam Pasal 5 Ayat 1 UU tersebut terdapat 22 hak penyandang disabilitas yang salah satunya adalah hak pariwisata.

Pariwisata sebagian besar berfokus pada orang-orang yang berpartisipasi daripada orang-orang yang dikecualikan dari partisipasi. Mereka yang dianggap sebagai "yang lain", diabaikan atau terlupakan dari pariwisata. Biasanya mereka mengalami marginalisasi yang berdasarkan status sosial-ekonomi rendah, etnisitas, keturunan asli, usia, gender, orientasi seksual, kemampuan, atau kompleksitas dari efek-efek identitas ini yang saling berhubungan begitu juga dengan penyandang disabilitas (Darcy et al., 2020).

Penyandang disabilitas berarti seseorang mungkin memiliki keterbatasan emosional, mental, sensorik, kognitif, fisik, gangguan perkembangan, atau gabungan dari hal-hal tersebut. Di bidang pariwisata, kelompok orang ini sering diasumsikan tidak tertarik untuk bepergian. Dalam berwisata banyak penyandang disabilitas merasa harus dikorbankan padahal mereka memiliki keinginan dan kebutuhan pariwisata yang sama dengan kelompok sosial lainnya. Penyandang disabilitas ingin mengunjungi lebih banyak destinasi sebanyak mungkin sebelum kondisi penyakit mereka memburu (Eusebio, Alves, & Teixeira, 2023)

Ditambah lagi melibatkan penyandang disabilitas dalam kegiatan pariwisata juga memiliki implikasi penting bagi anggota keluarga atau orang di sekitar mereka mereka. Hal ini memberikan waktu bagi pengasuh di keluarga untuk sebagian terlepas dari tugas mereka. Hal ini juga dapat mempromosikan pelarian dari rutinitas normal, memperkuat hubungan keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan umum (Agovino, Garofalo, & Marhesano, 2017).

Dalam berwisata, penyandang disabilitas menghadapi beberapa hambatan di antaranya yaitu informasi, kepercayaan diri, aksesibilitas, sarana, dan prasarana. Meskipun mereka merupakan kelompok wisatawan minoritas, mereka harus tetap diperhatikan dalam pengembangan pariwisata yang berkonsep keadilan untuk semua (Agovino et al., 2017). Hambatan - hambatan tersebut harus segera diatasi karena tidak sesuai dengan salah satu poin dari tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni mengenai target pada tahun 2030 dimana kota dan permukiman telah mempunyai ruang terbuka hijau dan ruang publik yang dapat diakses dan inklusif bagi semua orang termasuk bagi penyandang disabilitas. Agar terciptanya hal tersebut dalam pengembangan pariwisata, terutama pada sektor pengembangan aksesibilitas, harus memiliki konsep yang ramah bagi wisatawan penyandang disabilitas. Terutama dalam bidang akomodasi, transportasi dan sarana jalan (Tomej & Duedahl, 2023).

Seperti masyarakat pada umumnya, dengan perkembangan ekonomi dan perubahan sosial penyandang disabilitas juga menganggap bahwa status pariwisata telah mengalami pergeseran dari hal yang diinginkan secara sosial menjadi sesuatu hal yang dibutuhkan (Darcy et al, 2023). Sejalan dengan ekspektasi industri pariwisata, orang dengan disabilitas mengekspresikan keinginan untuk melakukan perjalanan. Namun, penyandang disabilitas tidak menunjukkan tingkat partisipasi yang sama dalam kegiatan pariwisata seperti orang tanpa disabilitas, meskipun telah ada kemajuan dalam penghapusan hambatan atau rintangan di industri pariwisata dan fasilitasnya. Penyebab tingkat partisipasi yang rendah ini masih belum jelas (Ozcan, Topcu & Arasli, 2021).

Menurut studi disabilitas, penyandang disabilitas menghadapi banyak hambatan untuk berpartisipasi. Dalam perspektif ini, beberapa penelitian pariwisata telah dilakukan mengenai hambatan perjalanan untuk memahami alasan yang mencegah partisipasi pariwisata bagi orang dengan disabilitas. Penelitian awal tentang ini dimulai oleh Smith tahun 1987 yang mengelaborasi tiga kategori hambatan: *intrinsic*, *environmental*, dan *interactional constraints* (Lee, Agarwal, & Kim, 2012).

Hubungan antara hambatan perjalanan penyandang disabilitas dan niat perjalanan dikondisikan oleh *intrinsic*, *environmental*, dan *interactional constraints*, yang didukung oleh *learned helplessness theory*. Penelitian yang terbatas telah dilakukan untuk melihat hubungan antara *perceived constraints* dengan *Learned helplessness* (Wen, Huang & Goh, 2020). Serta bagaimana peran *learned helplessness* menjadi mediator antara *intrinsic*, *environmental*, dan *interactional constraints* terhadap niat perjalanan. Sarmah & Chatterje (2022) juga melakukan penelitian bagaimana hubungan antara ketiga hambatan tersebut terhadap *Learned helplessness* dan niat untuk berwisata. Dalam konteks pariwisata, ketika seseorang terus-menerus diabaikan, mereka mulai merasa tidak dapat berperilaku sesuai keinginan mereka, yang berakibat hilangnya kepercayaan diri. Orang dengan disabilitas belajar untuk bersikap tanpa harapan untuk menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan, meskipun ada kesempatan untuk membantu mereka, yang lebih lanjut menciptakan niat perjalanan negatif. Oleh karena itu, kesempatan untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik meningkatkan niat turis untuk membeli kembali paket perjalanan (Sarmah et al., 2022).

Dalam konteks keramahan dan pariwisata, TPB (*Theory of Planned Behavior*) digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku dan niat. TPB telah digunakan untuk memahami niat wisatawan untuk berpartisipasi dalam pariwisata medis (Seow, Choong, Moorthy, & Choong, 2021) dan pariwisata liburan kerja (Meng & Han, 2018). Berdasarkan TPB, Nunkoo & Ramkissoon (2010) membuat model penelitian untuk meneliti pengaruh, *attitude*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control* pada niat untuk berwisata.

Niat untuk pergi wisata terbentuk sebagian karena mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul pada berbagai tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Dimulai dari pandangan terhadap perasaan kesukaan atau tidak suka terhadap tindakan suatu perilaku atau yang disebut dengan *attitude*. Dalam berwisata *attitude* ini berupa perasaan apakah ingin pergi berwisata dan bagaimana pandangan terhadap berwisata tersebut. Pandangan dari teman, rekan kerja, dan keluarga (*subjective norm*) juga mempengaruhi niat untuk. Pandangan mereka baik mendukung atau tidak mendukung akan mempengaruhi keputusan untuk pergi berwisata (Yuzhanin & Fisher, 2016). Selain itu, membentuk niat untuk melakukan perjalanan adalah hasil dari mengatasi kendala *perceived behavioral control* seperti kurangnya informasi, kendala bahasa dan ketersediaan uang untuk berwisata (Meng & Han, 2018). Mereka yang memiliki disabilitas sering mengalami kendala yang berbeda dalam sifat dan tingkat keparahannya dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki disabilitas (Sarmah et al., 2022).

Memberikan perhatian khusus terhadap minat berwisata wisatawan penyandang disabilitas merupakan salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan

perekonomian dan inklusivitas pariwisata Sumbar. Sehingga visi menjadi provinsi destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya di wilayah Indonesia bagian barat pada tahun 2025 dapat terwujud (Perda Sumbar No. 3 tahun 2014). Sumbar dapat memanfaatkan potensi pasar wisatawan penyandang disabilitas dan mempromosikan pariwisata inklus.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi minat wisatawan penyandang disabilitas di Sumatra Barat dalam mengunjungi destinasi pariwisata ditinjau dari TPB.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *intrinsic constraints* terhadap *learned helplessness* pada wisatawan penyandang disabilitas di Sumatra Barat?
2. Bagaimana pengaruh *interactional constraints* terhadap *learned helplessness* pada wisatawan penyandang disabilitas di Sumatra Barat ?
3. Bagaimana pengaruh *environmental constraints* terhadap *learned helplessness* pada wisatawan penyandang disabilitas di Sumatra Barat ?
4. Bagaimana pengaruh *learned helplessness* terhadap *travel intention* pada wisatawan penyandang disabilitas di Sumatra Barat?
5. Bagaimana pengaruh *subjective* terhadap *travel intention* pada wisatawan penyandang disabilitas di Sumatra Barat?
6. Bagaimana pengaruh *attitude* terhadap *travel intention* pada wisatawan penyandang disabilitas di Sumatra Barat ?
7. Bagaimana pengaruh *perceived behavioral control* terhadap *travel intention* pada wisatawan penyandang disabilitas di Sumatra Barat ?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh *intrinsic constraints* terhadap *learned helplessness* pada wisatawan penyandang disabilitas di Sumatra Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh *interactional constraints* terhadap *learned helplessness* pada wisatawan penyandang disabilitas di Sumatra Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh *environmental constraints* terhadap *learned helplessness* pada wisatawan penyandang disabilitas di Sumatra Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh *learned helplessness* terhadap *travel intention* pada wisatawan penyandang disabilitas di Sumatra Barat.
5. Untuk mengetahui pengaruh *subjective norms* terhadap *travel intention* pada wisatawan penyandang disabilitas di Sumatra Barat.
6. Untuk mengetahui pengaruh *attitude* terhadap *travel intention* pada wisatawan penyandang disabilitas di Sumatra Barat.
7. Untuk mengetahui pengaruh *perceived behavioral control* terhadap *travel intention* pada wisatawan penyandang disabilitas di Sumatra Barat.



1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi dan peneliti

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu bidang pariwisata dan penyandang disabilitas, khususnya mengenai variabel *intrinsic*, *environmental*, dan *interactional constraint*, *learned helplessness*, *attitude*, *subjective norms*, *perceived behavioral control*, dan *travel intention*.

2. Bagi pelaku pariwisata

Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi pemerintah dan pengelola wisata agar lebih memperhatikan pengembangan pariwisata yang ramah terhadap wisatawan penyandang disabilitas.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok permasalahan agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dibatasi pada minat penyandang disabilitas di Sumatra Barat dalam mengunjungi destinasi pariwisata.
2. Variabel yang digunakan dibatasi yaitu *intrinsic constraint*, *interactional constraint*, *environmental constraint*, *learned helplessness*, *subjective norm*, *attitude*, dan *perceived behavioral control*.

1.6 Sistematika Penelitian

Secara umum, penulisan ini terbagi dalam lima bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan satu sama lain. Sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai *theory of planned behavior* (TPB), *travel intention*, penyandang disabilitas, *intrinsic constraints*, *interactional constraints*, *environmental constraints*, *learned helplessness*, *attitude*, *subjective norms*,

perceived behavioral control, Penelitian Terdahulu, Pengembangan Hipotesis, dan Kerangka Konseptual.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, desain penelitian, waktu dan tempat, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional, dan prosedur analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini dijelaskan mengenai profil responden, analisis deskriptif dari variabel penelitian, hasil pengujian data hipotesis beserta pembahasan tentang hasil yang diperoleh.

Bab V Penutup

Bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan, implikasi, keterbatasan dan saran penelitian yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Daftar Pustaka

Berisikan referensi yang digunakan dalam penulisan ini

